

Sublanskap yang Terlindungi, Produktif, dan Berkelanjutan Melalui Tata Kelola Kehutanan yang Efektif, Kolaboratif dan Inovatif

Rencana Pengelolaan Sublanskap Muara Merang-Kepayang

Amiril, Andri Abbas, Lia karlina sinamo, Jolinatalius Aritonang,
Januardi Masrullah, Machmudi, Ingriyani





Suplemen Taklimat **Edisi Bentang Lahan #07**

Sublanskap yang Terlindungi, Produktif, dan Berkelanjutan Melalui Tata Kelola Kehutanan yang Efektif, Kolaboratif dan Inovatif

Rencana Pengelolaan Sublanskap Muara Merang-Kepayang

Tim Penyusun

Amiril, S.Hut., Andri Abbas, S.Hut.,
Lia Karlina Sinamo, S.Hut.,
Jolinatalius Aritonang, S.Hut.,
Januardi Masrullah, S.Kom.,
Machmudi, S.P., Ingriyani, S.Ak.

Tim Teknis

Ira Ratna Sari, Seruni Fauzia Lestari, Arif Budi Nugraha,
Cecilia Novia, Dewi Kiswani Bodro, Nurhayatun Nafsiyah,
Thifali Adzani, Rendra Bayu Prasetyo, Anugerah Yuliadi,
Yoga Lorensa Putra, Era Irhamni, Agrian Maulana, Yesi
Lismawati, Syamsul Asinar, Asep Suryadi, Feri Johana,
Ni'matul Khasanah, Suyanto, Andree Ekadinata, Sonya Dewi

Tim Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan

Pijar Riza Anugerah
Riky Mulya Hilmansyah

World Agroforestry (ICRAF)

2026

Amiril, Abbas A, Sinamo LK, Aritionang J, Masrullah J, Machmudi, Ingriyani, Sari IR, Lestari SF, Nugraha AB, Novia C, Bodro DK, Nafsiyah N, Adzani T, Prasetyo RB, Yuliadi A, Putra YL, Irhamni E, Maulana A, Lismawati Y, Asinar S, Suryadi A, Johana F, Khasanah N, Suyanto S, Ekadinata A, Dewi S, Anugerah PR. 2026. Suplemen Taklimat Edisi Bintang Lahan #07 - Sublanskap yang Terlindungi, Produktif, dan Berkelanjutan Melalui Tata Kelola Kehutanan yang Efektif, Kolaboratif dan Inovatif - Rencana Pengelolaan Sublanskap Muara Merang-Kepayang. Bogor, Indonesia: World Agroforestry (ICRAF).

Publikasi ini dapat direproduksi untuk tujuan non-komersial sepanjang tidak mengubah isi, dengan kewajiban mencantumkan sumber sesuai kaidah yang berlaku.

Informasi disusun seakurat mungkin berdasarkan pengetahuan saat diterbitkan; namun penerbit tidak memberikan jaminan apa pun dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul dari penggunaannya.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415
Email: cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

2026

Daftar Isi

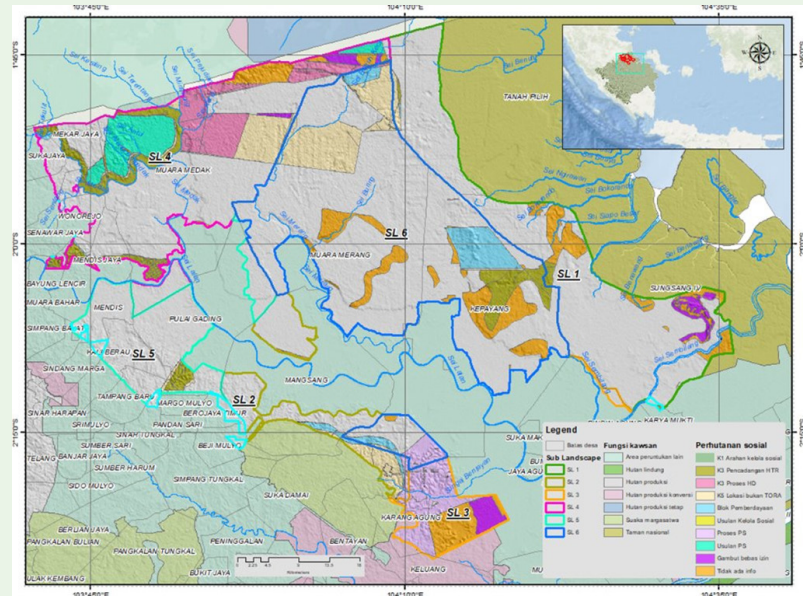
Gambaran Umum.....	3
Apa itu Rencana Pengelolaan Lanskap?	4
Strategi Pengelolaan dan Capaian Dambaan.....	5
Peta Intervensi: Rekomendasi Spasial Intervensi Kegiatan.....	6
Keterkaitan SL dan Resor KPH (Rekomendasi Sinergi dan Integrasi)	7
Strategi 1 - Penguatan Alternatif Mata Pencapaian	8
Strategi 2- Pengoptimalan Pemanfaatan Lahan melalui Perhutanan Sosial	9
Strategi 3 - Pencegahan dan Pengelolaan Risiko Karhutla secara Terpadu	10
Strategi 4 - Perlindungan Area Ekologis Bernilai Konservasi Tinggi Secara Terpadu	11
Pengembangan Alternatif Mata Pencapaian Berkelanjutan melalui Skema Hutan Desa	12
Kesimpulan	14

Gambaran Umum

Terletak di tengah area Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Lalan Mendis, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, terhampar Sublanskap Muara Merang-Kepayang, sebuah wilayah yang kaya akan keindahan alam dan kehidupan. Sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, keberadaan dan kelestarian Sublanskap Muara Merang-Kepayang memiliki peran yang sangat penting.

Sublanskap ini menjadi rumah bagi 3 desa yang tersebar di Kecamatan Bayung Lencir. Dengan luas wilayah mencapai 139.999,16 hektare, Sublanskap Muara Merang-Kepayang dikenal memiliki proporsi area yang didominasi oleh belukar rawa (43%) atau seluas 60.250,8 hektare.

Sublanskap Muara Merang-Kepayang bukan hanya sekadar hamparan geografis, bukan hanya sekadar hamparan geografis, tetapi juga rumah bagi warisan budaya dan keanekaragaman hayati yang kaya.



Apa itu Rencana Pengelolaan Lanskap?

Foto oleh CIFOR-ICRAF Indonesia

- 1 Lemahnya tata kelola dan kapasitas kelembagaan berdampak** pada alih fungsi lahan ilegal, pembalakan liar, serta meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan.
- 2 Pemanfaatan kawasan hutan belum optimal.** Di Sublanskap Muara Merang-Kepayang, telah terdapat dua izin pengelolaan dua hutan desa. Dari data PIAPS, terdapat areal pencadangan seluas 21.877 ha dan potensi PS seluas 1.342 ha.
- 3 Perlindungan hutan lemah dengan risiko karhutla dan degradasi ekosistem tinggi** yang mengancam kesehatan, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan petani. Perubahan iklim yang disertai dengan praktik pertanian yang belum berkelanjutan seperti pemanfaatan pupuk kimia berlebih, juga berkontribusi pada penurunan unsur hara dan kualitas air.
- 4 Rantai nilai produk HHBK** belum cukup baik, sehingga Masyarakat masih memilih komoditas sawit untuk dikembangkan, meskipun secara ilegal.



Visi/Tujuan Bersama Sublanskap Muara Merang-Kepayang: Terwujudnya sublanskap yang terlindungi, produktif, dan berkelanjutan melalui tata kelola kehutanan yang efektif, kolaboratif dan inovatif

Strategi Pengelolaan dan Capaian Dambaan



STRATEGI-1

Penguatan alternatif mata pencaharian

Dalam kurun waktu 10 tahun, pendapatan masyarakat meningkat sebesar 40%

Pemanfaatan berkelanjutan



STRATEGI-2

Pengoptimalan pemanfaatan lahan melalui Perhutanan Sosial

Pada tahun 2036, seluruh areal KPH yang dapat dikelola dengan PS dapat dimanfaatkan

Pemanfaatan berkelanjutan

Restorasi



STRATEGI-3

Pencegahan dan pengelolaan risiko karhutla secara terpadu

Pada tahun 2036, tidak ada kebakaran di Sublanskap Muara Merang - Keparang

Konservasi

Restorasi



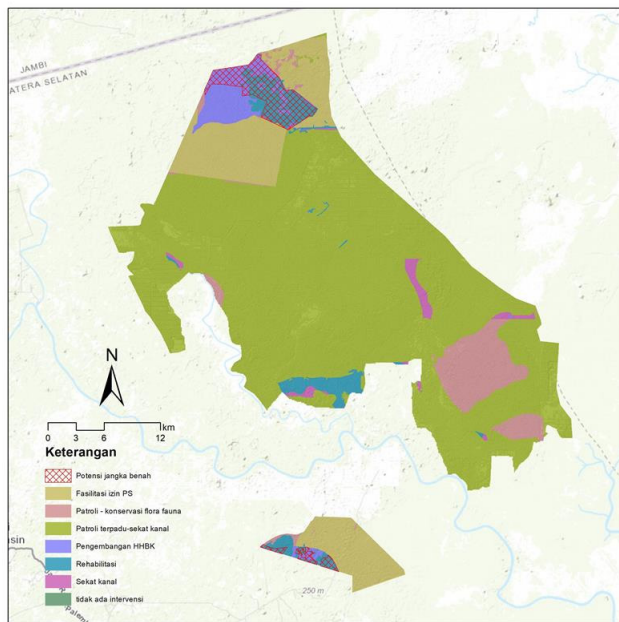
STRATEGI-4

Perlindungan area ekologis bernilai konservasi tinggi secara terpadu

Pada tahun 2036, 100% area ekologis bernilai ekosistem tinggi tidak mengalami eksploitasi sumber daya alam

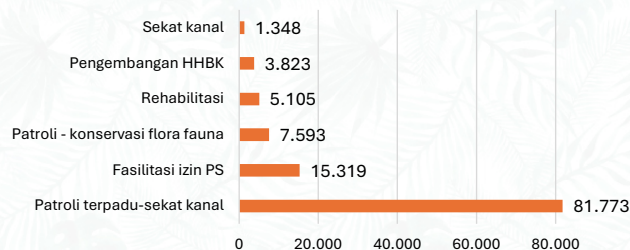
Konservasi

Peta Intervensi: Rekomendasi Spasial Intervensi Kegiatan

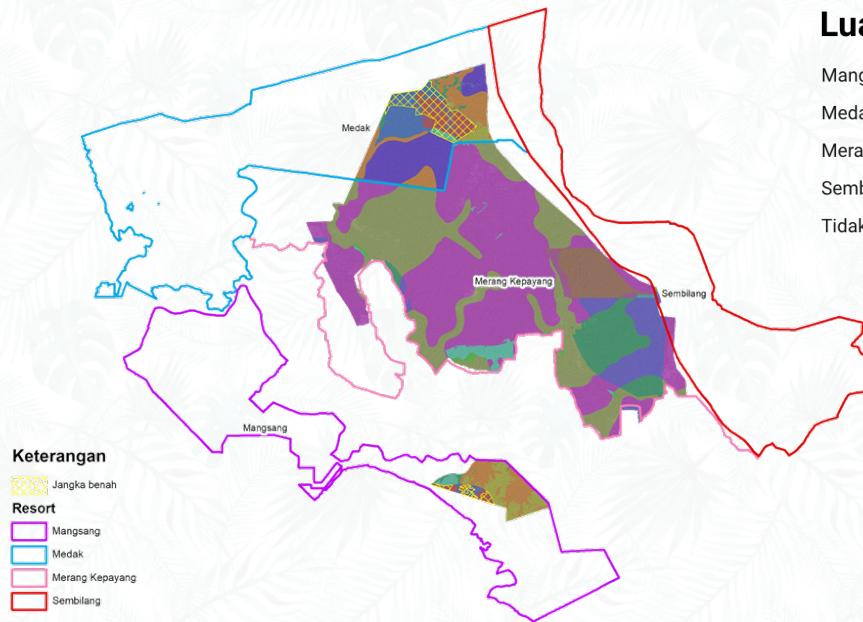


Peta intervensi adalah representasi spasial dari strategi pengelolaan lanskap yang menunjukkan lokasi spesifik di mana intervensi tertentu akan diterapkan. Peta ini disusun berdasarkan unit dan penentuan lokasi kegiatan intervensi. Dengan menggunakan peta intervensi, keputusan-leputusan pengelolaan yang spesifik dapat dibuat secara lebih akurat, dengan memastikan bahwa setiap tindakan selaras dengan kondisi kebutuhan spesifik tiap wilayah.

Keempat strategi Sublanskap Muara Merang-Kepayang telah dipetakan pada unit perencanaan yang ada. Daerah dengan luasan areal terbesar adalah area untuk strategi patroli terpadu yang disertai dengan sekat kanal untuk pencegahan dan pengelolaan risiko karhutla. Strategi ini berada pada luas 81.773 ha atau 71% dari total luasan Sublanskap Muara Merang-Kepayang. Selain intervensi tersebut, fasilitas izin PS juga memiliki areal yang cukup dominan yaitu 15.319 ha atau mencapai 13.33 % dari total luas Sublanskap Muara Merang-Kepayang.



Keterkaitan SL dan Resor KPH (Rekomendasi Sinergi dan Integrasi)



Luas SL 6 terhadap resor KPH

Mangsang	5,964.96
Medak	17,699.1
Merang Kepayang	115,620.65
Sembilang	463.75
Tidak ada data	250.7

Proporsi luas terhadap SL 6 serta wilayah yang memiliki potensi untuk dilakukan intervensi jangka benah.

Rekomendasi Aktivitas Pada Setiap Strategi

Strategi 1 - Penguatan Alternatif Mata Pencapaian

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggung jawab	Tagging RPHJP
1	Penguatan alternatif mata pencapaian		Pendapatan Masyarakat meningkat 40% pada tahun 2036.		
1.1	Pelatihan budidaya komoditas agroforestri yang adaptif lahan (kopi, karet unggulan, buah-buahan lokal)	Jumlah pelatihan	Setiap kelompok mendapatkan pelatihan dua kali per tahun	KPH, Dishut, Balai PS, Mitra	Pertumbuhan Investasi, Pengembangan Industri, Promosi Produk Hasil Hutan dan Pasar untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional
1.1.1	Pengembangan komoditas unggulan lokal	Jumlah petani yang mengadopsi pola agroforestri	Setiap tahun meningkat 5%	KPH, Dishut, Balai PS, petani	
1.1.3	Pendampingan pengolahan pasca panen	Jumlah UMKM yang mengolah HHBK	Setiap tahun meningkat 5%	KPH, Dishut, Balai PS, Mitra	
1.2	Peningkatan kapasitas kelompok usaha				
1.2.1	Pengembangan bisnis model komoditas	Jumlah model bisnis yang berjalan	Setiap tahun meningkat 5%	KUPS, KPH, Dishut,	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan KPH
1.2.2	Pelatihan manajemen usaha	Jumlah pelatihan	Setiap kelompok mendapat pelatihan 2x per tahun	KPH, Dishut, Balai PS, Mitra	
1.2.3	Pendampingan pemasaran	Jumlah KUPS yang didampingi	Meningkat setiap tahun	KPH, Dishut	
1.3	Fasilitasi akses pasar melalui kemitraan dengan offtaker dan BUMDes atau lembaga lainnya	Produk KUPS memiliki pasar	Meningkat setiap tahun	Pemdes, KPH, Dishut, Balai PS, Mitra	
1.3.1	Pengembangan jejaring mitra	KUPS memiliki kemitraan yang berkeadilan	Meningkat setiap tahun	KUPS, KPH, Dishut, Mitra	
1.3.2	Penguatan kelembagaan BUMDes dalam pengembangan industri HHBK	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas BUMDes	2 kali/tahun	Pemdes, KPH, Dishut	

Strategi 2- Pengoptimalan Pemanfaatan Lahan melalui Perhutanan Sosial

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggungjawab	Tagging RPHJP
2	Mendorong peningkatan akses lahan melalui perhutanan sosial	Seluruh areal KPH yang dapat dikelola dengan PS, dapat dimanfaatkan pada tahun 2036			
2.1	Peningkatan tata Kelola area PS	Laporan movev area dengan izin PS	Diupdate setiap tahun	KPH, Dinas Kehutanan, Balai PS	Implementasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Fasilitasi Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi
2.1.1	Monitoring dan evaluasi PS	Database implementasi PS	Diupdate setiap tahun	KPS, KPH, Dinas Kehutanan	
2.1.2	Implementasi Jangka benah	Penambahan jenis MPTS	10% per tahun	KPH, Dinas Kehutanan, Balai PS, mitra	
2.1.3	Penyusunan rencana jangka benah sebagai bagian dari RKPS	Dokumen RKPS	Setiap KPS memiliki RKPS	KPS, KPH	
2.1.4	Plot percontohan agroforestry	Jumlah petani yang mengadopsi pola agroforestri	Setiap tahun meningkat 5%	KUPS, KPH	
2.1.5	Akses pendanaan inovatif	Jumlah pendanaan yang dapat diakses Jumlah penerima manfaat	Meningkat 10% setiap tahun	KPH	
2.2	Fasilitasi Pengajuan persetujuan izin PS	Jumlah kelompok yang mendapatkan izin Kelola PS	Meningkat setiap tahun	KPH, Dinas Kehutanan, Balai PS	Fasilitasi Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Bimbingan Teknis Dalam Mendukung Kegiatan Perhutanan Sosial
2.2.1	Pendampingan intensif pengajuan PS	Meningkatnya jumlah KTH yang izin PS-nya disetujui	100%	KPH, Dinas Kehutanan, Balai PS, KTH	
2.2.2	Penyusunan rencana kerja PS disertai system movev	Dokumen RKPS	1 tahun pasca mendapatkan izin	KPS, KPH, Dinas Kehutanan, Balai PS	
2.3	Fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial	Area PS yang semula sawit Kembali berhutan		KPS, KPH, Dinas Kehutanan, Balai PS	Fasilitasi Pendampingan, Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Bimbingan Teknis Dalam Mendukung Kegiatan Perhutanan Sosial
2.3.1	Pembentukan Kelompok Usaha	Jumlah KUPS, minimal 30% anggotanya perempuan	Meningkat 10% per tahun	KPH, Dinas Kehutanan, Balai PS	
2.3.2	Pengembangan bisnis model PS	Dokumen RKPS yang memuat rencana jangka benah	Dokumen RKPS selesai 1 tahun pasca movev	KPS, KPH	

Strategi 3 - Pencegahan dan Pengelolaan Risiko Karhutla secara Terpadu

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggungjawab	Tagging RPHJP
3	Pencegahan dan Pengelolaan Risiko Karhutla secara Terpadu	Frekuensi Karhutla menurun sebanyak 50% pada tahun 2036			
3.1	Penguatan Kelembagaan dalam Pencegahan dan Pengendalian Karhutla				Fasilitasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Mitigasi Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
3.1.1	Penegakan hukum	% pelanggaran yang ditindak	100% pelanggaran ditindak	Dishut	
3.1.2	Kolaborasi dan koordinasi antar lembaga	Kegiatan berjalan lancar	2 kali per tahun	KPH, Dishut, Balai PS, Mitra	
3.1.3	Penguatan KMPA	Jumlah KMPA yang aktif	Meningkat 10% setiap tahun	KPH, Dishut, Balai PS, Mitra	
3.2	Pembuatan sekat kanal	Jumlah sekat kanal	Meningkat setiap tahun	KPH – pemegang konsesi – KPS, Dishut	Fasilitasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Mitigasi Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
3.2.1	Kolaborasi dan koordinasi antar lembaga				
3.2.2	Identifikasi dan perencanaan	Dokumen rencana (jumlah sekat kanal)	Dapat diterapkan 10% per tahun	KPH – pemegang konsesi – KPS, Dishut	
3.2.3	Penyusunan rencana operasional, monitoring dan pembagian peran	Dokumen rencana (jumlah sekat kanal)	Dapat diterapkan 10% per tahun	KPH – pemegang konsesi – KPS, Dishut	
3.3	Rehabilitasi lahan yang terdegradasi	Luas area yang direhabilitasi	50 ha per tahun		Fasilitasi Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi
3.3.1	Penanaman dengan MPTS	1. Luas area penanaman 2. Jumlah jenis tanaman asli	1. Meningkatkan 5% per 5 tahun 1. Meningkatkan jumlahnya per tahun	KPH – pemegang konsesi – KPS, Dishut, Mitra	

Strategi 4 - Perlindungan Area Ekologis Bernilai Konservasi Tinggi Secara Terpadu

ID	Intervensi/aktivitas	Indikator	Target	Penanggungjawab	Tagging RPHJP
4	Perlindungan Area Ekologis Bernilai Konservasi Tinggi Secara Terpadu	100% area ekologis bernilai konservasi tinggi tidak mengalami eksploitasi sumber daya alam pada tahun 2036.			
4.1	Pengamanan terpadu	1. Jumlah pembalakan liar 2. Jumlah perburuan liar	1. Menurun setiap tahun 2. Menurun setiap tahun	KPH – pemegang konsesi – KPS, Dishut	Fasilitasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Mitigasi Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
4.1.1	Penguatan kelembagaan dan koordinasi	1. Jumlah pelatihan 2. Koordinasi	1. Dua kali per tahun 2. Koordinasi setiap bulan	KPH – pemegang konsesi – KPS, Dishut	
4.1.2	Pencegahan (patroli, edukasi)	1. Jumlah patroli 2. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan edukasi	1. Patroli setiap bulan 2. Meningkatkan setiap tahun	KPH – pemegang konsesi – KPS	
4.1.3	Penegakan hukum	% pelanggaran yang ditindak	100% pelanggaran ditindak	Dishut Provinsi	
4.2	Monitoring populasi	Database flora fauna	Update setiap tahun – populasi meningkat	KPH – pemegang konsesi – KPS, Dishut	Implementasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.2.1	Penelitian/inventarisasi flora fauna	Database flora fauna	Update setiap tahun	KPH – pemegang konsesi – KPS, Dishut	
4.2.2	Edukasi	Kerusakan SDA berkurang	Setiap tahun % kerusakan berkurang	KPH – pemegang konsesi – KPS, Dishut	

Pengembangan Alternatif Mata Pencaharian Berkelanjutan melalui Skema Hutan Desa

Merupakan suatu usulan model usaha yang dapat dijadikan sebagai sarana kerjasama pada tingkat Sublanskap dalam pengelolaan Perhutanan Sosial, dengan kerangka sebagai berikut:

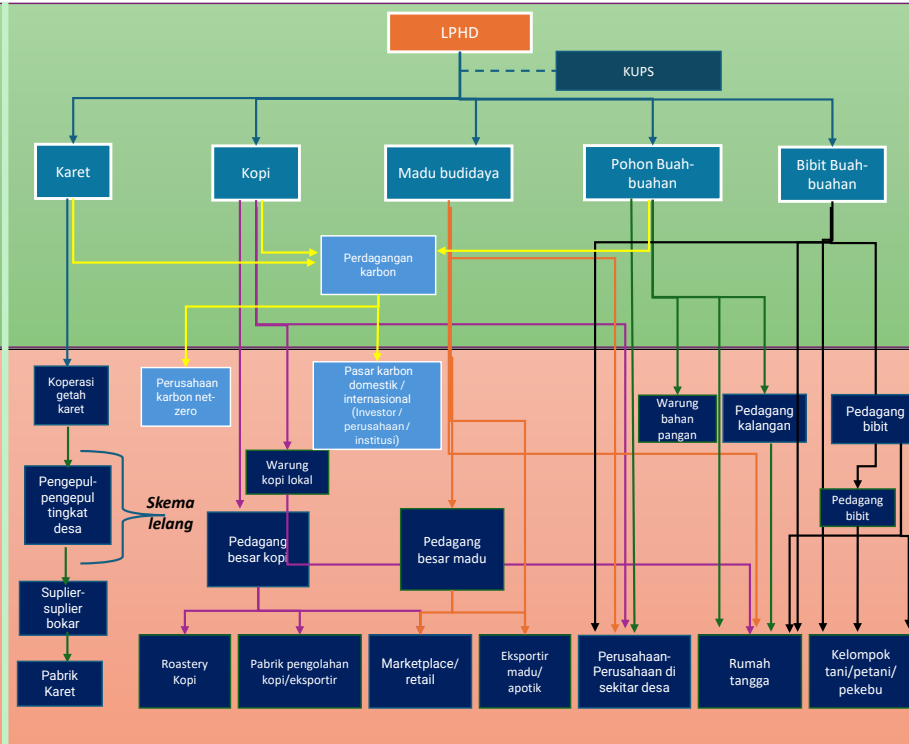
- **Struktur kelembagaan:** LPHD menetapkan SOP, target, dan akuntabilitas; KUPS menjadi operator bisnis yang mengelola dan mengonsolidasikan usaha di sub-lanskap Muara Medak–Kepayang.
- **Portofolio usaha utama:** 5 klaster komoditas/jasa: karet, kopi, madu budidaya, buah-buahan, dan bibit buah-buahan (untuk replanting/ekspansi).
- **Alur rantai pasok & pasar:**
 - Karet → koperasi/pengepul → *supplier* BOKAR → pabrik (opsi skema lelang)
 - Kopi → warung/pedagang besar → roastery/pengolahan/eksportir
 - Madu → pedagang besar → marketplace/retail + ekspor
 - Buah → warung/pedagang kalangan → rumah tangga + perusahaan sekitar
 - Bibit → pedagang bibit → kelompok tani/petani/pekebun
- **Pendapatan tambahan (perdagangan karbon):** praktik penanaman/agroforestri dikemas KUPS sebagai portofolio jasa karbon untuk pasar domestik/internasional melalui kemitraan investor/perusahaan.
- **Tugas pemangku kepentingan kunci:** LPHD mengesahkan SOP, skema bagi hasil, dan kontrak offtaker; KUPS menjalankan agregasi, mutu/grading, logistik, pencatatan/traceability, lelang karet, dan pengemasan/olah sederhana; koperasi/pengepul/pedagang memastikan serapan, standar mutu, dan pembayaran yang jelas.

Faktor Pemungkin**Proses produksi**

- Regulasi dan legalitas kawasan perhutanan sosial
- Ketentuan pemanfaatan di hutan produksi
- Aturan pengelolaan ekosistem gambut
- Regulasi tentang skema jangka benah
- Ketentuan rehabilitasi dan perlindungan/pemulihan Kawasan hutan
- Kepatuhan pada rencana kerja (RKU/RKT)
- Pedoman teknis budidaya
- Aturan kemitraan dan kelembagaan
- Undang-undang, PP & Peraturan Menteri, Pedoman Tambahan & Mekanisme Praktis ttg skema karbon
- Prinsip kesetaraan gender

Pemasaran

- PBPH multi usaha
- Aturan tata niaga hasil hutan
- Ketentuan pemasaran sawit dalam skema jangka benah
- Pengalihan bertahap ke komoditas kehutanan/agroforestri
- Sertifikasi, Standar Keberlanjutan, traceability
- Sertifikasi pembibitan
- Provisi Sumber Daya Hutan
- SNI penanganan pasca panen, pengolahan dan standar kualitas produk
- Peraturan Pemerintah & Pemen LHK ttg perdagangan karbon; mekanisme pasar & pembelian oleh perusahaan net-zero; sertifikasi, verifikasi, & pelaporan emisi
- Prinsip kesetaraan gender
- Program kredit usaha mikro

Kegiatan usaha inti**Fungsi pendukung Institusi pendukung**

- Input pertanian & perkebunan: benih/bibit unggul, pupuk organik, pestisida dan herbisida organik, sarana produksi
- Tenaga penyuluh pertanian/perkebunan/kehutanan
- Penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan & pendampingan produksi
- Pengetahuan dan sumber informasi
- Teknologi tepat guna & terjangkau
- Infrastruktur pendukung
- Dukungan tata kelola & pengawasan
- Sumber pembiayaan & permodalan

- LPHD dan KUPS
- Pemerintah desa
- Kementerian Kehutanan
- KPH Lolan Mendis
- Dinas Provinsi Sumel
- Polhut
- BKSDA Sumel
- Bappeda Muba
- Dishut Muba
- Dinas TPHP Muba
- Balai Penyuluhan Pertanian
- Dinas Koperasi, UKM Muba
- Disperindag Muba
- PUPR Muba
- Badan registri karbon / Sistem Registri Nasional (SRN)
- Lembaga verifikasi independen (MIRV)
- DPMD Muba
- BPBD Muba
- Pemegang PBPH
- Pendamping PS / Mitra Pembangunan / Akademisi
- Lembaga keuangan formal & investor

- Penguatan kapasitas (pelatihan dan pendampingan) pengelolaan bisnis, penambahan nilai ekonomi, pemasaran
- Gudang
- Sertifikasi
- Pelabelan & pengemasan
- Teknologi informasi
- Saluran distribusi & infrastruktur pendukung
- Informasi harga & akses pasar
- Kemitraan dan jaringan pemasaran
- Sumber pembiayaan & permodalan

- KPH Lolan Mendis
- Pemerintah desa
- BUMDesa/KMP
- Dinas TPHP Muba
- Bursa karbon / marketplace karbon
- Dinas Koperasi & UKM
- Lembaga Sertifikasi (ISPO / GAP / Organik)
- Dinas Perindustrian & perdagangan
- DPMDTSP
- AEKI/ASKI
- GAPKI
- GAPKINDO
- KADIN
- NGOs, Lembaga riset, universitas
- Lembaga pembiayaan formal & investor
- Sektor swasta/perusahaan/Pabrik

Kesimpulan

- 1 Rencana pengelolaan Sublanskap Muara Merang-Kepayang merupakan suatu instrumen untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bijaksana. Rencana pengelolaan lanskap ini mengarahkan alokasi ruang di Sublanskap Muara Merang-Kepayang sesuai dengan visi bersama yang telah disepakati, yaitu sublanskap yang terlindungi, produktif, dan berkelanjutan melalui tata kelola kehutanan yang efektif, kolaboratif dan inovatif dengan menawarkan beragam pendekatan untuk meningkatkan ketahanan lanskap dengan solusi berbasis alam.
- 2 Penyusunan Rencana Pengelolaan Lanskap merupakan upaya kolaboratif antar pemangku kepentingan di lanskap Kahu. Rencana ini merupakan hasil dari proses diskusi yang dihadiri dan disepakati bersama oleh perwakilan dari KPH Lalan Mendis, Pemerintah Desa Muara Merang, Kelompok Kepayang Tani Maju, LPHD Kepayang, LPHF Muara Merang, PT. Sumber Hijau Permai, PT. Restorasi Hutan Sumatera, PT. Tripupa Jaya, PT. Global Alam Lestari, PT. Hutan Berkah Mulia, PT. RHM, NGO
- 3 Menuju pencapaian visi pengelolaan Sublanskap Muara Merang-Kepayang, proses kolaboratif penyusunan Rencana Pengelolaan Lanskap menghasilkan 4 strategi utama, yaitu: 1) Penguatan alternatif mata pencaharian, 2) Pengoptimalan pemanfaatan lahan melalui Perhutanan Sosial, 3) Pencegahan dan pengelolaan risiko karhutla secara terpadu, dan 4) Perlindungan area ekologis bernilai konservasi tinggi secara terpadu.
- 4 Setiap strategi pengelolaan Sublanskap Muara Merang-Kepayang memiliki serangkaian indikator, target, dan pemangku kepentingan penanggungjawab sebagai wujud pemantauan dan evaluasi secara partisipatif. Sebagai ilustrasi, pengoptimalan pemanfaatan lahan melalui perhutanan social bertujuan untuk mengelola 30.000 ha kawasan hutan secara Lestari dalam kurun waktu 10 tahun.
- 5 Sublanskap Muara Merang-Kepayang memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan pengelolaan hutan berkelanjutan. Rencana pengelolaan ini disertai dengan model bisnis yang mendukung, yakni budidaya HHBK, tanaman MPTS dan perdagangan karbon.
- 6 Keberhasilan implementasi strategi-strategi pada Rencana Pengelolaan Sublanskap Muara Merang-Kepayang sangat bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga sektor swasta, termasuk perbankan. Selain itu, upaya mengintegrasikan rencana ini ke dalam kebijakan pengelolaan yang lebih luas, seperti dokumen RPHJP, RPHJPd, RPJPD, RPJMD dan rencana sektoral lainnya, menjadi langkah yang krusial. Terakhir, kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan juga berperan penting dalam meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan alternatif, guna mewujudkan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan.



In partnership with
Canada



#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #lahanuntukkehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.

CIFOR-ICRAF Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang | Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415 | Email: cifor-icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

